Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 14 No. 3 September 2014

HARAPAN BARU DI ERA JOKOWI

Setelah digelarnya pemilu legislatif dan eksekutif, maka sudahlah terisi kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Propinsi maupun Kabupaten/Kota), dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. Usainya dua pemilu tadi bukan hanya meninggalkan jejak sejarah dinamika berdemokrasi di Indonesia dengan suasana yang tenang dan damai, akan tetapi malah berlanjut pertarunganya dalam ranah legislatif melalui pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPR serta alat kelengkapan dewan lainnya antara Koalisi Indonesia Hebat (Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan Jokowi) dan Koalisi Merah Putih (Koalisi Pendukung Capres Prabowo Subianto). Perseteruan mereka bukan hanya menambah carut marut wajah demokrasi di Indonesia, akan tetapi juga menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik.

Tidaklah bijak jika pada awal-awal pemerintahan, Joko Widodo disibukkan dengan persoalan yang ada dilegislatif. Dengan memilih anggota kabinet dan menamakannya Kabinet Kerja, sesungguhnya Jokowi sudah memiliki maksud untuk menjadikan kabinetnya sebagai kabinet yang mengutamakan kerja, bukan seremonial belaka. Akan tetapi menjadi pertanyaan adalah, adakah kesanggupan dari anggota kabinet untuk mengikuti irama kerja sang presiden. Memang ada kesan latah dari beberapa menteri dengan menjiplak secara kasar irama kerja dengan cara "blusukan" khas Jokowi, akan tetapi itu sebenarnya belum cukup untuk menunjukkan kinerjanya. Masih perlu dibuktikan dengan langkah nyata dan prestasi agar apa yang dipercayakan oleh Jokowi kepadanya benar-benar terwujud.

Sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah atau lebih tepatnya pengawas jalannya pemerintahan, legislatif juga seharusnya mengakhiri kisruh yang ada di dalamnya. Pemikiran untuk mengadakan DPR tandingan, adalah wujud kekecewaan sekaligus jiwa kerdil yang tidak bisa menerima kekalahan. Banyak pekerjaan menanti, dan jika kisruh terus berlanjut, akan dikemanakan nasib negeri ini. Dalam hal ini perlu jiwa besar untuk menerima segala akibat dari proses demokrasi.

Harapan baru sudah sepatutnya muncul dari pemimpin baru, yang dengan proses pencitraan lewat media massa selalu digadang-gadang mampu untuk membawa masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik. Dengan bantuan luar biasa dari media yang dimiliki oleh partai pendukungnya, Jokowi diuntungkan dengan berbagai prestasi yang kurang memuaskan selama menjabat kepala daerah. Akankah hal yang sama berlaku untuk dia selama menjadi Presiden, nampaknya akan setali tiga uang. Akan selalu disajikan berita-berita yang membuat citra Jokowi tak luntur di mata rakyat, meski demikian akan ada sajian tandingan dari media lain yang dikuasai oleh partai yang tergabung dalam KMP. Inilah yang disebut perang media, efek media.

Tentu saja perang tersebut tidak kita harapkan, karena isi atau substansi yang diwartakan hanya akan membawa bangsa ini pada jurang perpecahan menjurus ke kehacuran. Harapan yang telah muncul selama masa kampanye pada pemimpin baru seharusnya dipupuk agar menjadi tumbuh subur dalam kerangka peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Meski demikian, agar harapan rakyat yang begitu tinggi tidak disalahgunakan, diperlukan pengawasan dari lembaga pengawas formal maupun informal agar tujuan yang telah ditetapkan justru disalahgunakan oleh penguasa dengan cara menjual aset-aset bangsa. Kita tunggu kiprah dari pemimpin baru ini.

Purwokerto, September 2014
Penyunting,

Agus Raharjo